

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA
DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan publik Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan pembagian tanggung jawab instansi pemerintah pusat sesuai tugas dan fungsi yang Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembagian Tanggung Jawab Kementerian/Lembaga Pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT.

KESATU : Menetapkan Pembagian Tanggung Jawab Kementerian/Lembaga Pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Tanggung Jawab Kementerian/Lembaga Pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan panduan bagi Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam upaya memberi dan menerima informasi terkait kegiatan advokasi pemerintah pusat.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN
TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA DIREKTORAT ADVOKASI
PEMERINTAH PUSAT

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JANUARI 2020

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN/LEMBAGA DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

Subdirektorat Advokasi dan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman			
Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	
1	Kementerian Dalam Negeri	1	Kementerian Agama	1	Kementerian Keuangan	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Kementerian Luar Negeri	2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2	Kementerian Ketenagakerjaan	2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Kementerian Pertahanan	3	Kementerian Kesehatan	3	Kementerian Perindustrian	3	Kementerian Perhubungan
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4	Kementerian Sosial	4	Kementerian Perdagangan	4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subdirektorat Advokasi dan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman			
Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5	Kementerian Pertanian	5	Kementerian Kelautan dan Perikanan
6	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	Kejaksaan Agung	7	Kementerian Pemuda dan Olahraga	7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	7	Badan Koordinasi Penanaman Modal
8	Tentara Nasional Indonesia	8	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	8	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
9	Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	9	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	9	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
10	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	10	Badan Pusat Statistik	10	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11	Mahkamah Agung	11	Komisi Pemilihan Umum	11	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
12	Komisi Pemberantasan Korupsi	12	Badan Narkotika Nasional	12	Otoritas Jasa Keuangan	12	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan

Subdirektorat Advokasi dan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman			
Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	
13	Badan Intelijen Negara	13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	13	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
14	Dewan Ketahanan Nasional	14	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	14	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	14	Badan SAR Nasional
15	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	15	Badan Pengawas Pemilihan Umum	15	Dewan Perwakilan Rakyat	15	Badan Tenaga Nuklir Nasional
16	Ombudsman Republik Indonesia	16	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	16	Dewan Perwakilan Daerah	16	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
17	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	17	Badan Pengelola Keuangan Haji	17	Lembaga Penjamin Simpanan	17	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
18	Komisi Yudisial RI	18	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	18	Badan Standardisasi Nasional	18	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
19	Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia	19	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	19	Majelis Permusyawaratan Rakyat	19	Dewan Energi Nasional
20	Mahkamah Konstitusi RI	20	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	20	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	20	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
21	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	21	Badan Kepegawaian Negara	21	Komite Nasional Keuangan Syariah	21	Badan Restorasi Gambut

Subdirektorat Advokasi dan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan				Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman			
Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian		Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Kemaritiman	
22	Lembaga Ketahanan Nasional	22	Lembaga Administrasi Negara	22	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Air Minum
23	Komisi Kejaksaan	23	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	23	Badan Pemeriksa Keuangan	23	Kementerian Sekretariat Negara
24	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	24	Komisi Aparatur Sipil Negara	24	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	24	Sekretariat Kabinet
25	Badan Siber dan Sandi Negara	25	Arsip Nasional Republik Indonesia	25	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	25	Badan Keamanan Laut
				26	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	26	Kantor Staf Presiden
						27	Badan Informasi Geospasial
						28	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO